

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat pada alenia ke 4 adalah : (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Untuk memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan sosial.

Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud adalah kondisi manusia dimana masyarakat dalam kondisi yang makmur, maka dari itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan. Rasyid (dalam Labolo, 2011: 36).

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah di atur Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerinthan daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di

tetapkanlah UU No 32 tahun 2004 yang sekarang di ganti dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana telah diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan Kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan tanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintah Pusat di Daerah, pada bagian ketiga yaitu urusan pemerintah konkuren yang dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 sebagai berikut :

#### Pasal 11

1. Urusan pemerintah konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

#### Pasal 12

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
- f. Sosial;

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;

3. Sementara itu adapun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Parawisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;

- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi;

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 12 tersebut disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah urusan pilihan yaitu urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah provinsi Riau. Ibukota Kampar yaitu Bangkinang. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah sekitar 27.908,32 km merupakan daerah yang terletak antara 1 00'40'' Lintang Utara sampai 0 27'00'' Lintang Selatan dan 100 28'30'' Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar antara lain meliputi:

1. Di sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
2. Di sebelah selatan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Di sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
4. Di sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar merupakan bagian perangkat daerah yang

berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Bidang, dan 3 Subbag dan Seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut dibawah ini.

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Perencanaan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:

1. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri
2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri

D. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri
2. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan

E. Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
2. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## F. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial
2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial
3. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangannya. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang usaha industri dan perdagangan dan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Bupati.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
- b. Penyusunan Rancangan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan
- c. Menyelenggarakan Pengaturan Kemitraan IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) dengan Perusahaan Besar dan Menengah
- d. Menyelenggarakan Pemantauan atau Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Sembilan Bahan Pokok, Barang Strategis dan Barang Penting lainnya
- e. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian, Perizinan, Tertip Usaha, dan Perlindungan Konsumen

- f. Melaksanakan Pengembangan Ekspor- Inport Hasil Industri dan Pertanian
- g. Melaksanakan Pengawasan Penetapan Standart Industri dan Produk tertentu yang berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Umum, kesehatan dan Kerusakan Lingkungan.
- h. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pergudangan
- i. Pelaksanaan Konservasi dan Inventarisasi dibidang Industri dan Perdagangan
- j. Melaksankan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Perusahaan Perdagangan dan Industri
- k. Menyelenggrakan Pembinaan Produksi Industri, Sarana dan Prasarana Perdagangan
- l. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan atau Peralatan, Perencanaan Organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas
- m. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- n. Pengelolaan Unit Pelaksaas Teknis (UPTD)

Adapun pembagian tugas mengenai Pembinaan Industri Kecil terdapat pada Bidang Perindustrian yaitu pada Seksi Pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar yang di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan.

Untuk Melaksanakan tugasnya terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 pada Pasal 14 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Aneka Industri mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan keetentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian dan informasi di seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah argo, kimia, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri dan kerajinan untuk meningkatkan dan pengembangan industri
- e. Menyusun rencana dan bahan pembinaan Aneka industri dan kerajinan
- f. Menyusun strategi perencanaan dan pemasaran dan promosi produk Aneka Industri dan Kerajinan
- g. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta
- h. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada seksi Aneka Industri dan Kerajinan sebagai dasar untuk pengembangan IKM
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu rincian tugas dari Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Aneka Industri atau Kerajinan Industri yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil dan menengah. Untuk itu penulis hanya memfokuskan pada pembinaan dalam Industri Pandai Besi di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Karena mengingat

Industri Pandai Besi ini sebenarnya mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi daerah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Maka dari itu diperlukan Pembinaan dengan baik dan Maksimal.

Arti penting perindustrian terhadap perkembangan perekonomian dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi yang termaktub dalam GBHN 2002-2004: “Mengembangkan perekonomian yang berpotensi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan SDA dan SDM dengan menghapus segala bentuk perlakuan dan diskriminatif dan hambatan.”

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan dibidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendaya gunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia.

Menurut Miftah Thoha (2010 : 207) “ pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik” Pembinaan dalam penelitian ini

adalah suatu tindakan yang dilakukan seperti dengan memberikan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Perindustrian dan Pengelolaan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa peran dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar terkait dengan memberikan dampak yang positif terhadap usaha Industri Pandai Besi yang dimiliki oleh masyarakat, baik terhadap peningkatan keterampilan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktifitas sehingga berdampak pada perbaikan kualitas produk, serta membuka peluang pasar. Akan tetapi, dalam hal ini perlu disadari minimnya kegiatan keterampilan yang diberikan kepada pelaku Industri Pandai Besi tentu berdampak pada kurangnya kreatifitas dan keterbatasan pengetahuan pelaku Industri pandai besi akan perkembangan dan persaingan usaha terutama terhadap perubahan mode tau trend dan selera msayrakat.

Pada dasarnya, udaha industri pandai besi yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar masih tergolong usaha rumah tangga berskla kecil karena dalam kegiatannya hanya melibatkan anggota keluarga. Pembinaan terhadap usaha pandai besi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri maupun kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan daerah lain.

Industri adalah salah satu kegiatan pokok ekonomi manusia yang sangat penting. Kegiatan ini berupaya melalui proses bahan mentah menjadi barang baku

dan barang jadi, melalui proses kegiatan industri dapat dihasilkan berbagai barang yang menjadi kebutuhan manusia.

Pembangunan industri sangat penting untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, laju serta kualitas pertumbuhan ekonomi. Pembangunan industri ini merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi, sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai. Industri di pandang sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Pembangunan industri itu juga dapat berlangsung dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu selain yang menyangkut faktor teknologi industri, juga besar peranannya adalah dukungan dari masyarakat dimana industri itu berada. Oleh karena itu, masyarakat setempat harus dibina dan dipersiapkan untuk kehadiran dan kelanjutan adanya suatu industri. Pembinaan dan penyiapan masyarakat menjadi masyarakat industri, hanya dimungkinkan oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Munculnya industri merupakan bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik (Saripudin,2005:165).

Menurut Sarbini (1988 dalam Saripudin , 2005 : 166-167), hal ini juga dimaksud untuk menyerap tenaga kerja dari perdesaan dapat mengurangi urbanisasi. Demikiannya dengan masyarakat Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar yang mengembangkan industri pandai besi, telah memberikan beberapa peluang seperti adanya kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat.

Industri pandai besi merupakan suatu usaha perorangan yang bergerak dalam bidang pertukangan besi. Seseorang yang menunjukkan peranan dan terbukti kemahirannya, biasanya diakui sebagai pakar dalam bidang tersebut. Kemahiran pandai besi pada awalnya tertumpu pada pembuatan senjata tradisional seperti keris, parang, dan pedang yang diwariskan secara turun temurun melibatkan segala potensi yang ada dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi peralihan tradisi perpandaian dari membuat senjata tradisional ke alat-alat pertanian atau perkebunan. Oleh sebab itu masyarakat Kecamatan Kampar masih banyak yang mempertahankan dan melakukan usaha pandai besi ini, yaitu juga dikarnakan mayoritas masyarakat Kecamatan Kampar banyak berpropesi sebagai petani juga berkebun dan juga faktor ekonomi yang semakin sulit, juga untuk mempertahankan peninggalan leluhur mereka. Akan tetapi banyak pengrajin pandai besi ini beralih profesi dan meninggalkan pekerjaan ini, yakni di akibatkan persaingan di dalam maupun diluar Kabupaten Kampar sangatlah tinggi, keterbatasan teknologi yang modern dan yang paling utama mereka terbentur sekali akan modal usaha.

Seharusnya pemerintah Kabupaten Kampar melihat semua ini, karena pekerjaan pandai besi ini sangatlah menjanjikan sekali dan tidak terlalu banyak daerah yang ada di Provinsi Riau ini yang bekerja sebagai pengrajin pandai besi bisa dibilang pekerjaan ini sekarang sanagatlah langkahan dan membutuhkan skil dan pemahamam dalam pembuatan pandai besi ini. Dan semua itupun ada di

Kecamatan Kampar, mereka hanya tinggal diberikan Pembinaan dan Pendampingan yang baik, teratur dan paling utama berjangka panjang.

Kecamatan kampar sangatlah berpotensi untuk mengembangkan usaha pandai besi ini dikarenakan mereka masih banyak yang berpropesi sebagai pengrajin pandai besi tersebut, dan mengetahui cara pembuatan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasaran, tetapi mereka masih terbentur oleh kendala seperti peralatan yang masih kurang memadai atau masih menggunakan peralatan yang tradisional, kurangnya modal yang akibatnya mereka hanya memproduksi apa-apa yang diminta oleh konsumen saja, Tapi sayangnya pengembangan industri kecil khususnya pandai besi di Kabupaten Kampar kurang mendapat perhatian dari pemerintah, mengingat peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional jangka panjang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penulis membahas usaha ini :

Pertama, pada usaha ini produk-produk yang di produksi merupakan produk yang sangat akrab dengan kehidupan keseharian kita, adapun beberapa jenis produk yang di produksi pada usaha pandai besi di Kecamatan Kampar anantara lain : Pisau, Pisau Deres, Dodos, Aigrek, Locak, Gancu, Begol, dan Tojok Sawit, Kompak Sawit, Parang Pendek, Parang Panjang, Pisau Sayur, Keris.

Kedua, Tingginya permintaan pasar terhadap produk dari usaha pandai besi di Kecamatan Kampar baik permintaan dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kampar membuat usaha ini masih tetap eksis berdiri dari zaman ke zaman. Produk usaha pandai besi hingga saat ini terus mengeliat untuk menembus persaingan pasar baik lokal maupun memenuhi kebutuhan di luar Kabupaten

Kampar yang pemasarannya yang tergolong menjanjikan. Tapi masih banyak para pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar yang simpang siur terhadap masalah pemasaran produk tersebut, itu dikarenakan masih kurangnya pendampingan sosialisasi pemerintah terhadap para pengusaha pengrajin pandai besi tersebut, oleh sebab itu banyak pengrajin pandai besi yang hanya menjual produk-produknya tersebut dengan harga yang relatif murah.

Ketiga, potensi pemasaran yang kurang diiringi dengan suku cadang atau bahan baku yang berkualitas, sehingga menyebabkan produksi industri pandai besi di Kecamatan Kampar kurang mampu bersaing dengan daerah lain diluar Kabupaten Kampar.

Industri pandai besi merupakan salah satu industri kecil dan kerajinan rakyat di kabupaten kampar. Adapun banayak pandai besi Per-Kecamatannya antara lain:

**Tabel I.1 Pandai Besi yang ada di Kabupaten Kampar**

<b>No.</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>PENGRAJIN</b>
1	Bangkinang	-
2	Bangkinang Barat	-
3	Bangkinang Seberang	-
4	Gunung Sahilan	-
5	Kampar	32 orang
6	Kampar Kiri	-
7	Kampar Kiri Hilir	5 orang
8	Kampar Kiri Hulu	-
9	Kampar Timur	-
10	Kampar Utara	-
11	Perhentian Raja	-
12	Rumbio Jaya	72 orang
13	Salo	-
14	Siak Hulu	-
15	Tambang	6 orang
16	Tapung	-
17	Tapung Hilir	-
18	Tapung Hulu	-
19	XIII Koto Kampar	-
20	Kampar Kiri Tengah	-
21	Koto Kampar	-
<b>JUMLAH</b>		<b>115 orang</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2017*

Berdasarkan Tabel diatas pengrajin pandai besi Per-Kecamatan berjumlah 115 pengrajin yang tersebar di 21 Kecamatan, adapun pengrajin pandai besi Di Kecamatan Kampar berjumlah 32 pengrajin yang dimana setiap pengrajin memiliki 3 hingga 5 orang anggota yang menjadi fokus peneliti untuk melihat sejauhmana Peranan Dinas terkait dalam pembinaan Pengrajin Pandai Besi.

Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam usaha industri, industri dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:



### **1. Industri Kecil**

Industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih banyak dibanding industri rumah tangga. Industri kecil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Modal yang digunakan 5 juta – 200 juta.
- b. Jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang.
- c. Menggunakan teknologi sederhana.
- d. Biasanya hanya merupakan usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Industri kecil biasanya bergerak di bidang makanan dan kerajinan.

### **2. Industri Sedang**

Industri sedang merupakan industri yang membutuhkan lebih banyak modal dan jumlah tenaga kerja. Ciri-ciri industri sedang adalah sebagai berikut.

- a. Modal yang digunakan dari 200 juta – 500 juta.
- b. Tenaga kerja berjumlah 20 sampai 99 orang.
- c. Sudah menggunakan teknologi yang cukup tinggi tapi masih banyak menggunakan tenaga manusia.
- d. Sudah menerapkan manajemen meskipun masih sederhana.
- e. Sudah ada pembagian kerja, misalnya bagian keuangan, administrasi, produksi, dan pemasaran.

### **3. Industri Besar**

Berdasarkan modal dan jumlah tenaga kerja, industri besar memiliki tingkatan yang paling tinggi. Industri besar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Membutuhkan modal berkisar diatas 500 juta.
- b. Tenaga kerja yang dibutuhkan lebih dari 100 orang.

- c. Menggunakan mesin-mesin berat dan modern.
- d. Lebih banyak menggunakan tenaga mesin dari pada tenaga manusia.
- e. Produk yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor.
- f. Manajemen perusahaan sangat rapi.
- g. Pembagian kerja sudah jelas, misalnya direktur, bagian produksi, pemasaran, administrasi, keuangan, personalia, dan sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 yang mempunyai rincian tugas memberikan bimbingan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan industri kecil, menengah dan besar, merupakan penyangga perekonomian rakyat yang perlu memperoleh pembinaan dan perlindungan secara intensif dari pemerintah. Adapun tujuan pembinaan dan Perlindungan Industri Kecil adalah untuk :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil dalam melakukan kegiatan ekonominya.
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah.

Dari beberapa potensi industri dan kerajinan rakyat yang ada di Kabupaten Kampar, dan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dinilai masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga dapat dinilai masih ditemukan permasalahan. Seperti dalam pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat dinilai belum dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat masih banyak industri kecil dan khususnya kerajinan pandai besi di Kecamatan Kampar yang kurang paham atas apa yang disampaikan dan diajarkan tenaga pendamping dalam memberikan pelatihan mengenai industri kecil dalam mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat. Dan pelaksanaan pelatihan yang diberikan seperti pelatihan pengelolaan macam-macam besi dan cara membuat dengan teknik yang baik dengan menggunakan alat yang modern masih kurang diberikan juga tidak dibarengi dengan pembinaan dalam bentuk pemberian pendampingan, sehingga Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat terbentur dengan kekurangan teknologi dan juga terbentur akan modal usaha.

Selanjutnya dapat dilihat pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar yang telah mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibawah ini :

**Tabel I.2 Pengrajin Pandai Besi yang suda mendapatkan bantuan Teknologi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

No	Nama	Anggota / Pekerja	Nama Peralatan
1	Junaidi	5 Orang	Blower, Disel,dan Gerinda
2	Rosidi	5 Orang	Blower, Disel,dan Gerinda
3	Wadar	4 Orang	Blower, Disel,dan Gerinda

**Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2017**

Dapat dilihat dari tabel diatas dari 32 orang Pengrajin Pandai Besi hanya 3 orang saja yang mendapatkan bantuan Peralatan, tidak semua pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar dapat bantuan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja, oleh sebab itulah banyak pengrajin pandai besi yang membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan produk pandai besinya.

Selanjutnya apabila dilihat dari pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, maka pembinaan dibidang pemasaran juga masih kurang maksimal diberikan kepada pengusaha Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, sehingga salah satu yang menjadikan kendala adalah tingkat pemasaran hasil produksi masih rendah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, bahwa berdasarkan observasi dan dari hasil survey dilapangan penulis dijumpai fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Masih banyak Pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar yang belum menggunakan teknologi yang modern dalam hal ini seperti menggunakan palu beralaskan besi juga dibantu dengan gerinda dan bersifat tradisional dan membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya.
2. Pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar masih kekurangan pelatihan seperti pengetahuan tentang macam-macam besi yang baik juga bagus digunakan dan masih terbentur akan modal dalam mengembangkan usaha industri pandai besi tersebut.
3. Pengrajin pandai besi di Kecamatan Kampar kesulitan dalam memasarkan produk usaha pandai besi tersebut.

Dari fenomena diatas maka peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul penelitian : **“Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Membina Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Kampar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Apabila dilihat dari permasalahan diatas, pengrajin pandai besi yang berada di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar belum bisa dikatakan baik. Sehingga diperlukan Pembinaan secara maksimal.

Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan yang baik diperlukan peran dari Pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinasikannya. Mencermati kondisi atau gejala tersebut dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimanakah Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Membina Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?”**.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tentang Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pembinaan pengrajin pandai besi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan penulis, yang terjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang ilmu pemerintahan pada umumnya, khususnya pelaksanaan pembinaan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
3. Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kampar dalam melaksanakan pembinaan Industri Kecil secara maksimal.

